

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Nasional

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Nasional

Teori Sadono Sukirno (2016:36) menyatakan bahwa pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh factor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu, diperkirakan suatu negara memiliki pendapatan nasional tinggi apabila jumlah serta kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam melimpah. Menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Oleh karena itu pendapatan nasional merupakan ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang.

2.1.1.2 Jenis Pendapatan Nasional

1. Produk Domestik Bruto

1.1 Pengertian Produk Domestik Bruto

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai barang atau jasa dalam suatu negara yang

diproduksikan oleh faktor faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing (Sukirno, 2016:49). Menurut Rudriger (2006:112), produk domestik bruto / GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Produk Domestik Bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan/diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi dalam suatu negara. Produk Domestik Bruto disajikan dalam dua konsep harga, yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku, merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun yang bersangkutan. Sementara Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan, merupakan nilai tambah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pada suatu tahun tertentu atau tahun dasar. PDB atas dasar harga berlaku memperlihatkan struktur perekonomian berdasarkan lapangan usaha. Sementara PDB atas dasar harga konstan memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai refleksi capaian yang diperoleh dalam pembangunan dalam jangka waktu tertentu.

1.2 Faktor-faktor penggunaan PDB

Menurut Arifin dan Gina (2009: 11), terdapat indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat produksi Domestik Bruto. Berikut factor-faktor digunakannya PDB sebagai indicator pengukuran pertumbuhan ekonomi:

- 1) Produk Domestik Bruto dihitung atas dasar konsep siklus aliran (*circular flow concept*) yaitu perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup perhitungan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung PDB memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
- 2) Produk Domestik Bruto dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini menyebabkan peningkatan PDB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- 3) Batas wilayah perhitungan PDB adalah Negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik.

1.3 Pendekatan Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diinterpretasikan menurut 3 pendekatan:

- 1) Menurut pendekatan produksi**, PDB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, yaitu:
 - a) Pertanian;
 - b) Pertambangan dan Penggalian;
 - c) Industri Pengolahan;
 - d) Listrik, Gas dan Air Minum;

- e) Bangunan;
- f) Perdagangan;
- g) Pengangkutan dan Komunikasi;
- h) Bank dan Lembaga Keuangan;
- i) Sewa Rumah;
- j) Pemerintah, dan
- k) Jasa-jasa.

2) Menurut Pendekatan Pendapatan, PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh factor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu negara dalam jangka waktu tertentu. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disenut sebagai nilai tambah bruto sektoral.

3) Menurut pendekatan pengeluaran, PDB merupakan komponen permintaan akhir seperti:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari laba,
- b) Konsumsi pemerintah,
- c) Pembentukan modal tetap domestic bruto,
- d) Perubahan stok, dan
- e) Ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu. Ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor.

2. Produk Nasional Bruto (PNB)

2.1 Pengertian Produk Nasional Bruto

Produk Nasional Bruto merupakan produk domestic bruto ditambah dengan pendapatan nasional neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas factor produksi (tenaga kerja, dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh dari Indonesia (Jamli, 2001:23). Produk Nasional Bruto adalah jumlah barang, dan Jam yang dihasilkan oleh penduduk suatu Negara, baik di dalam maupun di luar negeri selama satu tahun, tidak termasuk yang dihasilkan oleh warga Negara lain/asing (Muchtolifah, 2010:88)

2.2 Sifat-sifat Produk Nasional Bruto (PNB)

Sifat-sifat dari PNB adalah sebagai berikut:

- a) PNB adalah ukuran moneter , PNB tidak memperhitungkan perubahan yang terjadi pada nilai uang, maka PNB pada tahun tertentu tidak dapat dibandingkan dengan PNB pada tahun lain. Karena perubahan yang tedadi disamping menyangkut perubahan jumlah output juga harganya sehingga nilai uang yang digunakan tidak sama besamya.
- b) PNB hanya memperhitungkan barang dan jasa akhir saja, Barang dan jasa akhir adalah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Artinya barang dan jasa itu tidak lagi beredar dipasar untuk diperjual belikan. Untuk menghindari sesuatu produk dihitung lebih dari satu kali (double counting),dalam perhitungan PNB dipakai cara perhitungan lain yang dikenal dengan nama Cara Nilai Tambah.

Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan pada PNB oleh rumah tangga perusahaan dan terdiri dari penerimaan rumah tangga perusahaan itu dari penjualan barang dan jasanya dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga perusahaan tersebut untuk membeli barang dan jasa perusahaan lain (barang antra). Dengan demikian jelaslah bahwa PNB dapat juga dinyatakan sebagai keseluruhan nilai tambah rumah tangga perusahaan yang beroperasi dalam masyarakat selama kurun waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.

- c) PNB tidak menghitung nilai transaksi yang terjadi di pasar (organized market), merupakan Transaksi yang sematamata menyangkut uang (andil, obligasi dll), Transaksi barang bekas, Kualitas produk, Waktu luang, dan Ongkos perusahaan ekosistem.

2.3 Komponen Produk Nasional Bruto

GNP terdiri dari tiga komponen, antara lain:

- a) barang-barang konsumsi dan jasa-jasa yang dihasilkan untuk memenuhi permintaan perorangan dan swasta (C)
- b) barang-barang investasi yang dihasilkan untuk memenuhi permintaan rumah tangga perusahaan (I)
- c) barang-barang konsumsi dan jasa-jasa,serta barang – barang modal yang dihasilkan untuk memenuhi permintaan pemerintah (G).

Ahli ekonomi cenderung untuk mengukur pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan PNB riil perkapita. PNB riil perkapita diperoleh dengan mengukur jumlah rata-rata keseluruhan output yang didapat oleh setiap penduduk. Dengan demikian kenaikan PNB riil perkapita berarti kenaikan standar hidup masyarakat

(standar hidup lebih tinggi). Pendapatan Nasional merupakan salah satu tolok ukur yang sangat penting dalam menganalisis dan mengatasi masalah-masalah perekonomian yang dihadapi masyarakat suatu Negara, sehingga pendapatan nasional merupakan salah satu factor yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara.

3 Pendekatan Pendapatan Nasional

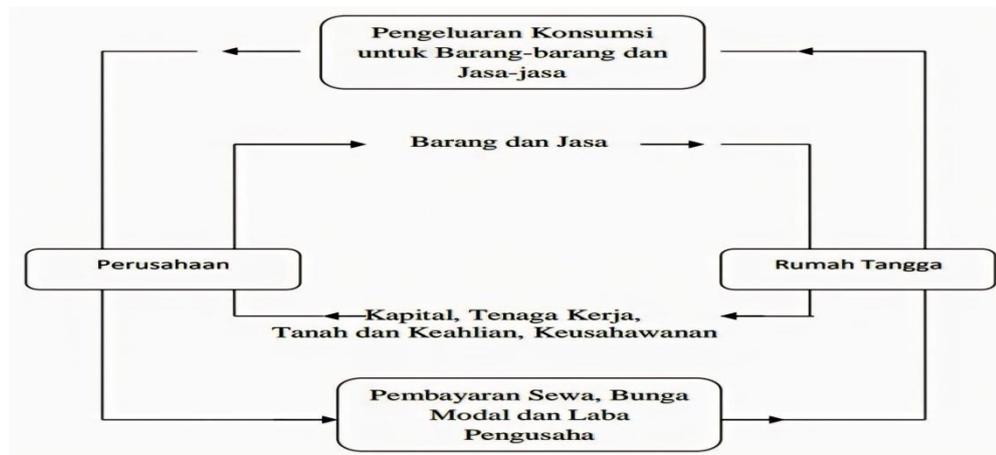
Pendapatan nasional menurut ilmu ekonomi memiliki tiga pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Dalam pendekatan produksi, pendapatan nasional yang dihitung dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah (*Value Added*) produk barang dan jasa yang dihasilkan dari semua sector ekonomi selama satu tahun. Pendekatan ini mencerminkan besarnya kontribusi berbagai sektor ekonomi terhadap pendapatan nasional dan menghindari perhitungan ganda.

2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Dalam pendekatan pendapatan, pendapatan nasional yang dihitung dilakukan dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya satu tahun. Masyarakat sebagai pemilik faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan. Faktor produksi tersebut berupa balas jasa (*Rent*) atas faktor produksi yang disewa dan tanah, upah (*wage*) untuk sumber daya manusia, bunga (*Interest*) atas modal yang dimiliki, dan keuntungan (*Profit*).



Sumber: (Jamli, 2001:15)

Gambar 2 Aliran Pendapatan dalam perekonomian

3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Dalam pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional yang dihitung dilakukan dengan cara menjumlahkan total seluruh pengeluaran sector-sektor ekonomi untuk membeli barang dan/atau jasa, yang dapat dinyatakan dengan:

$$PDB = C + I + G + X - M$$

Dimana:

PDB = Produk Domestik Bruto

C = Pengeluaran konsumsi rumah tangga

I = Pengeluaran investor kotor

G = Pengeluaran sector pemerintah

X = Ekspor barang dan jasa

M = Impor barang dan jasa

4 Manfaat Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan dan kebijakan yang diambil untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Maka dari itu, manfaat perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut (Mulyasari, 2019:20):

1. Membandingkan kemajuan perekonomian Negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dihitung setiap tahun. Karenanya, kemajuan atau kemunduran tiap sektor dapat dihitung. Data ini diperlukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi.
2. Menilai kinerja ekonomi suatu bangsa.
3. Sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Dengan data yang tersedia dapat diambil kesimpulan langkah yang harus diambil untuk memperbaiki perekonomian
4. Mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara cenderung dimasukan dalam golongan negara industri atau agraris.
5. Membandingkan perekonomian antardaerah atau antarnegara
6. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indicator dalam menentukan keberhasilan suatu Negara yang ditinjau dari berkembangnya infrastruktur, bertambahnya produksi barang industri, bertambahnya barang modal serta bertambahnya sector jasa. Menurut untoro (2010:39), pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan

produksi barang dan jasa masyarakat bertambah serta kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat disebabkan oleh banyaknya jumlah factor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi timbul karena factor-faktor yang bersifat “Rutin”, yaitu pertumbuhan penduduk dan akumulasi capital yang berasal dari tabungan masyarakat.

2.1.2.2 Pandangan Para Ahli

Dalam ilmu ekonomi terdapat banyak teori pertumbuhan ekonomi, dimana berbagai ekonom besar mempunyai pandangan atau persepsi yang berbeda mengenai proses pertumbuhan suatu perekonomian. Muchtolifah (2010:6) menyatakan bahwa terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Teori-teori pertumbuhan klasik.

- a. Teori Adam Smith**, dalam buku karangannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of NationS* (1776) Smith mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Pandangan-pandangannya yang utama adalah:

- **Peranan sistem pasaran bebas.** Smith berpendapat bahwa sistem mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Oleh sebab itu Smith merasa pemerintah tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Fungsi pemerintah perlulah dibatasi kepada menyediakan fasilitas-fasilitas yang menggalakkan perkembangan kegiatan pihak swasta. Menyediakan infrastruktur, mengembangkan pendidikan dan menyediakan pemerintahan yang efisien adalah beberapa langkah yang akan membantu perkembangan pihak swasta.
- **Peluasan pasar.** Perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan memproduksi dengan tujuan untuk menjualnya kepada masyarakat dan mencari untung. Semakin luas pasaran barang dan jasa, semakin tinggi tingkat produksi dan tingkat kegiatan ekonomi. Smith juga menekankan pentingnya pasaran luar negeri dalam mengembangkan kegiatan di dalam negeri.
- **Spesialisasi dan kemajuan teknologi.** Perluasan pasar, dan perluasan kegiatan ekonomi yang digalakkannya, akan memungkinkan dilakukan spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Seterusnya spesialisasi dan perluasan kegiatan ekonomi akan menggalakkan perkembangan teknologi dan produktivitas meningkat. Kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapatan pekerja dan kenaikan ini akan memperluas pasaran. Keadaan ini akan mengembangkan spesialisasi. Siklus ini akan

b. Teori Malthus dan Ricardo, berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsistem. Menganalisis akibat dari penambahan penduduk kepada pembangunan ekonomi, Malthus berpendapat pada mulanya, yaitu pada ketika rasio di antara faktor produksi lain dengan penduduk/tenaga kerja adalah relatif tinggi (yang berarti penduduk adalah relatif sedikit apabila dibandingkan dengan faktor produksi yang lain), penambahan penduduk dan tenaga kerja akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Akan tetapi, apabila jumlah penduduk/tenaga kerja adalah berlebihan apabila dibandingkan dengan faktor produksi yang lain, penambahan penduduk akan menurunkan produksi per kapita dan taraf kemakmuran masyarakat. Maka, penambahan penduduk yang terus berlaku tanpa diikuti penambahan sumber-sumber daya yang lain akan menyebabkan kemakmuran masyarakat mundur kembali ke tingkat subsistem.

2. Teori pertumbuhan modern

a. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar, Analisis yang dikembangkan oleh Keynes menunjukkan kepada kita bagaimana konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan tersebut akan menentukan tingkat pendapatan nasional. Analisis Harrod-Domar maju selangkah lagi dari keadaan ini. Teori Harrod-Domar mengingatkan kita bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah. Seterusnya dalam teori Harrod-Domar dianalisis keadaan yang perlu wujud agar pada masa berikutnya barang-

barang modal yang tersedia tersebut akan sepenuhnya digunakan. Teori Harrod-Domar menunjukkan bahwa jawaban kepada persoalan ini relatif sederhana, yaitu: agar seluruh barang modal yang tersedia digunakan sepenuhnya, permintaan agregat haruslah bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang-barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi di masa lalu. Dalam perekonomian dua sektor pertambahan perbelanjaan agregat terutama harus terwujud dari kenaikan investasi. Berarti untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang teguh, investasi harus terus menerus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Sekiranya keadaan ini tidak berlaku, pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan dan mungkin akan menghadapi resesi.

b. Teori pertumbuhan Neo-Klasik, Teorinya dikemukakannya dalam *Quarterly Journal of Economics* terbitan bulan Februari 1956, dalam tulisan yang berjudul: *A Contribution of the Theory of Economic Growth*. Teori Neo-Klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari pertambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Dengan demikian pendekatannya sangat berbeda dengan teori Harrod-Domar yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh segi permintaan yaitu bergantung kepada perkembangan permintaan agregat. Dalam analisis Neo-Klasik diyakini bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu dan perkembangannya dari satu waktu ke waktu lainnya.

Dengan demikian, pada hakikatnya ia tidak berbeda dengan pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik yang juga berpendapat bahwa perkembangan faktor-faktor produksi, terutama tenaga kerja dan modal, dan perkembangan teknologi merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Persamaan inilah yang menyebabkan teori pertumbuhan modern ini dinamakan teori NeoKlasik.

- c. **Teori pertumbuhan dengan “Uang”**, teori ini berawal dari karya James Tobin yang menyatakan bahwa terdapat tambahan adanya “Uang” didalam perekonomian sebagai alat tukar dan penyimpanan kekayaan.

3. Teori Schumpeter

Pandangan ini dikemukakan oleh Schumpeter dalam bukunya *The Theory of Economic Development*, yang diterbitkan pada tahun 1908. Dalam bukunya ini Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus menerus tetapi mengalami keadaan di mana adakalanya berkembang dan pada ketika lain mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (entrepreneur) melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa. menurut pendapat Schumpeter, inovasi tidak akan terus menerus berlangsung tetapi berlaku secara periodik yaitu adakalanya banyak dilakukan dan pada masa selanjutnya kurang dilakukan. pada ketika para pengusaha kurang melakukan investasi kemerosotan kegiatan ekonomi akan berlaku. pertumbuhan ekonomi akan berlaku kembali sekiranya para pengusaha melakukan inovasi yang baru yang akan menggalakkan investasi, perkembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan dalam produksi nasional.

2.1.3 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter merupakan factor yang dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi (Nopirin, 2014:51). Menurut Nanga (2005:180), kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah yaitu dengan cara mengendalikan tingkat bunga (*interest rates*) dan jumlah uang beredar (*money supply*). Perkembangan ekonomi suatu negara tentu mengalami pasang surut yang pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh melambat. Untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah atau otoriter moneter biasanya melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro. Inti dari kebijakan tersebut pada dasarnya adalah pengelolaan sisi permintaan dan sisi penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Warjiyo & Solikin, 2003:3).

Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan dengan *business cycle* (Siklus Kegiatan Ekonomi). Dalam hal ini, maka terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Dan sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang

ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar (Warjiyo & Solikin, 2003:3)

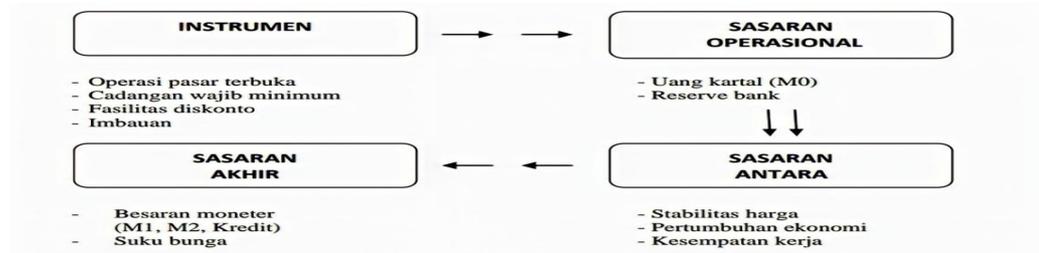
2.1.3.1 Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

Pada umumnya, kerangka kebijakan moneter terdiri dari instrument, sasaran operasional, sasaran antara, serta sasaran akhir. Sasaran antara diperlukan karena untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan, terdapat tenggat waktu antara pelaksanaan kebijakan moneter dan hasil pencapaian sasaran akhir. Oleh karena itu diperlukan adanya indikator-indikator yang lebih segera dapat dilihat untuk mengetahui indikasi kebijakan yang biasa disebut sasaran antara. Sasaran antara yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran akhir. Beberapa pilihan sasaran antara yang dapat digunakan antara lain besaran moneter seperti M1, M2, atau kredit dan suku bunga (Warjiyo & Solikin, 2003:24).

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran antara bank sentral memerlukan sasaran-sasaran yang bersifat operasional agar proses transmisi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sasaran operasional yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran antara dapat dikendalikan otoritas moneter dan informasi tersedia lebih awal daripada sasaran antara. Beberapa pilihan sasaran operasional yang dapat digunakan antara lain adalah uang primer (M0) dan suku bunga jangka pendek.

Sementara itu, instrument moneter adalah instrument yang dimiliki oleh bank sentral yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi sasaran-sasaran operasional yang telah ditetapkan. Beberapa pilihan instrumen yang digunakan antara lain adalah operasi pasar terbuka,

cadangan wajib minimum, fasilitas diskonto, dan imbauan. Secara ilustratif, kerangka kebijakan moneter dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: (Pohan, 2008: 38).

Gambar 3 Kerangka Kebijakan Moneter

Ilustrasi gambar diatas dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan kebijakan moneter di Indonesia antara periode sebelum maupun sesudah reformasi moneter, dimana sebelum tanggal 1 juni 1983 pengaturan jumlah uang beredar masih melalui penetapan pagu aktiva neto perbankan dan penetapan suku bunga (Pohan, 2008:39).

Sebagaimana telah dikemukakan, indicator kebijakan moneter terdapat dua variable yang dapat digunakan, yaitu tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Tingkat suku bunga merupakan harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu (Boediono, 2014:75). Sedangkan jumlah uang beredar merupakan penjumlahan dari uang kartal dan uang giral yang besarnya sudah didasarkan Bank Sentral.

2.1.3.2 Instrument Kebijakan Moneter

Instrumen pengendalian moneter merupakan alat-alat atau media operasi moneter yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi sasaran operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan. Instrumen-instrumen kebijakan moneter terdiri atas (Natsir, 2009:291):

- a. **Operasi Pasar Terbuka (OPT).** operasi bank sentral di pasar keuangan dilakukan dengan cara menjual dan membeli surat berharga, misalnya SBI
- b. **Tingkat Bunga Diskont.** fasilitas pinjaman jangka pendek dari bank sentral kepada bank-bank komersial dalam pengendalian likuiditasnya.
- c. **Giro Wajib Minimum (Reserve requirement).** Giro wajib minimum yang harus dipelihara bank-bank komersial di bank sentral.
- d. **Himbauan moral (moral suasion).**

2.1.3.3 Sasaran Operasional Kebijakan Moneter

Sasaran operasional merupakan sasaran yang segera ingin dicapai dalam operasi moneter. Variabel ini digunakan untuk mengarahkan sasaran antara. Penetapan sasaran operasional tergantung pada jalur mana yang diyakini efektif dalam transmisi kebijakan moneter. Kriteria sasaran operasional antara lain (Natsir dikutip dari Mishkin, 2004:418):

- a. Dipilih dari variabel moneter yang memiliki hubungan yang stabil dengan sasaran antara.
- b. Dapat dikendalikan oleh bank sentral.
- c. Tersedia lebih segera dibanding sasaran antara, akurat dan tidak sering direvisi.

2.1.3.4 Sasaran Antara Kebijakan Moneter.

Hubungan antara sasaran operasional dan sasaran akhir kebijakan moneter bersifat tidak langsung dan kompleks. Untuk alasan itu, para ahli moneter dan praktisi bank sentral mendesain simple rule untuk membantu pelaksanaan kebijakan moneter dengan cara menambahkan indikator yang disebut sebagai

sasaran antara (intermediate target). Sasaran antara merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan kebijakan moneter, sasaran ini dipilih dari variabel-variabel yang memiliki keterkaitan stabil dengan sasaran akhir, cakupannya luas, dapat dikendalikan oleh bank sentral, tersedia relatif cepat, akurat dan tidak sering direvisi, antara lain: agregat moneter (M1 dan M2), kredit perbankan dan kurs (Mishkin, 2004: 419).

2.1.3.5 Sasaran Akhir Kebijakan Moneter

Sasaran akhir kebijakan moneter tergantung pada tujuan yang dimandatkan oleh undang-undang bank sentral suatu negara. Sasaran akhir kebijakan moneter bisa berbentuk sasaran ganda dan sasaran tunggal. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI Pasal 7 ayat (1) secara eksplisit mencantumkan bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (stabilitas moneter).

2.1.4 Tingkat Suku Bunga

2.1.4.1 Gambaran umum Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan uang yang dinyatakan dalam persen per satuan waktu (per bulan atau per tahun). Dalam kamus ilmu ekonomi bunga diartikan sebagai imbalan yang dibayarkan oleh pinjaman atas dana yang diterima, bunga dinyatakan dalam persen (Tuwonusa, Rotinsulu, & Mandei, 2016:717). Kebijakan moneter menggunakan suku bunga sebagai indikator yang akan menetapkan tingkat suku bunga agar ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan kenaikan melampaui angka yang ditetapkan, bank sentral akan segera melakukan ekspansi

moneter agar suku bunga turun sampai pada tingkat yang ditetapkan tersebut, dan sebaliknya apabila suku bunga menurun, bank sentral akan melakukan kontraksi moneter (Pohan, 2008:42). Dengan penetapan suku bunga ini, bank sentral dapat melakukan ekspansi dan kontraksi moneter sesuai kebutuhan (Pohan, 2008:48).

Tingkat suku bunga dibedakan menjadi dua yakni:

1. Suku bunga nominal merupakan rate yang dapat diamati pasar.
2. Suku bunga riil merupakan konsep yang mengukur tingkat bunga sesungguhnya.

Tingkat suku bunga riil sama dengan suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi selama periode yang sama.

$$R_r = R_n - R_i$$

Dimana R_r = Tingkat bunga Riil, dan R_i = Laju inflasi.

2.1.4.2 BI Rate

BI rate adalah suatu kebijakan dalam penentuan nilai suku bunga yang ditetapkan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia serta diumumkan kepada public, BI rate mulai diimplementasikan sejak tahun 2005. Penetapan BI rate ini dilakukan dengan memperhatikan efeknya pada sasaran moneter yang ingin dicapai. Tetapi Sejak 19 Agustus 2016 Bank Indonesia mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-day (Reverse) Repo Rate menggantikan BI Rate. Perubahan ini mengacu pada best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate disingkat BI 7DRR yang digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil.

Instrumen BI 7DRR memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar.

Perubahan BI 7DRR mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI 7DRR menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga aktivitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI 7DRR untuk mengerem aktivitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.

2.1.4.3 Pandangan Para Ahli

Ada dua teori pokok mengenai struktur tingkat bunga, yakni teori klasik, dan teori Keynesian (Boediono, 2014:95).

1) Teori Keynesian

Teori Keynes dikenal dengan teori *liquidity preference*, dimana tingkat bunga semata-mata merupakan fenomena moneter yang pembentukannya terjadi di pasar uang. Artinya tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. Dengan demikian bahwa teori Keynes adalah teori ekonomi jangka pendek sebelum mencapai full employment.

2) Teori Klasik

Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran daripada investable fund yang bersumber dari tabungan. Teori ekonomi klasik mengasumsikan, bahwa perekonomian senantiasa berada dalam keadaan full employment. Menurut teori klasik, bahwa tabungan masyarakat adalah fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung.

2.1.5 Jumlah Uang Beredar

2.1.5.1 Pengertian Jumlah Uang Beredar

Uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, yang digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat disimpan, serta uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang (Solikin & Suseno, 2002:2). Penciptaan uang beredar pada dasarnya ditentukan atau dipengaruhi oleh otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat. Jumlah uang beredar yang tercipta tersebut merupakan jumlah uang yang ditinjau dari penyediaannya atau sisi penawaran. Sementara itu, dari sisi permintaan, masyarakat membutuhkan uang, baik uang kartal, uang giral, maupun uang kuasi, untuk membiayai semua kegiatan ekonominya. Idealnya, jumlah uang yang tercipta atau tersedia harus seimbang jumlah uang yang dibutuhkan atau diminta oleh masyarakat sehingga tidak terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah uang yang beredar (Solikin & Suseno, 2002:43).

2.1.5.2 Jenis Uang Beredar

Menurut Solikin dan Suseno (2002) terdapat tiga jenis uang, yaitu Uang Giral, Uang Kartal, dan Uang Kuasi. Definisi jumlah uang beredar terbagi menjadi dua yaitu :

1. Uang dalam arti sempit (M1)

Jumlah uang beredar dalam arti sempit adalah uang yang dipegang oleh masyarakat yang digunakan dalam transaksi sehari-hari yang mencakup uang kertas, uang logam, dan uang kartal yang ada diluar sistem perbankan.

2. Uang dalam arti luas (M2)

Jumlah uang beredar dalam arti luas merupakan perluasan dari definisi M1 ditambah dengan Uang Kuasi. Uang kuasi adalah bentuk kekayaan yang sangat likuid yang terdiri dari deposito berjangka atau rekening tabungan pada bank. Banyaknya uang yang beredar dalam masyarakat dapat digambarkan sebagai proses pasar. Kebijakan mengenai jumlah uang beredar ditentukan oleh Bank Sentral yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Namun jumlah uang beredar tidak hanya ditentukan oleh Bank Sentral tetapi juga oleh perilaku rumah tangga (yang memegang uang) dan bank (dimana uang disimpan).

2.1.5.3 Penyusunan Statistik Uang Beredar

Penyusunan statistic uang beredar pada dasarnya bersumber dari neraca bank sentral, neraca bank umum atau bank pencipta uang giral, dan kas Negara. Langkah penyusunan statistic uang beredar dilakukan dengan cara (Pohan, 2008:86).

1. Menyusun neraca analisis moneter dari neraca bank sentral
2. Menyusun neraca otoritas moneter, yaitu mengonsolidasikan neraca analisis moneter bank sentral dengan kas Negara.
3. Menyusun neraca analisis moneter dari neraca bank umum
4. Menyusun neraca system moneter yaitu mengonsolidasikan neraca otoritas moneter dengan neraca analisa moneter bank umum.

2.1.6 Kebijakan Fiskal

2.1.6.1 Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja Negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian (Rahayu, 2010: 1). Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar susunan permintaan agregat (Nopirin, 2014: 97). Secara umum, kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya dan efektivitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan/kekayaan dan upaya kesempatan kerja (Nopirin, 2014: 2). Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.

Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua jenis. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan yang menaikkan belanja Negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi. Kedua, kebijakan Fiskal Kontraktif merupakan yang menurunkan belanja Negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

2.1.6.2 Tujuan Kebijakan Fiskal

Menurut John F. Due (dikutip di Rahayu, 2010:3), terdapat 3 tujuan dari kebijakan fiskal yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
- 2) Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.
- 3) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.

2.1.6.3 Macam Kebijakan Fiskal

Dalam perkembangannya kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam atas dasar (Ujiyanto, dkk, 2017:44):

a. Pembiayaan fungsional

Tokoh dan kebijakan fiskal jenis ini adalah A.P. Lerner. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung

terhadap pendapatan nasional terutama guna meningkatkan kesempatan kerja (employment). Di lain pihak pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, sehingga dalam masa ada pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan. Selanjutnya pinjaman akan dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat. Kemudian apabila pajak maupun pinjaman dirasa tidak tepat, maka ditempuhlah pencetakan uang. Jadi pengeluaran pemerintah dan perpajakan dipertimbangkan sebagai suatu hal yang terpisah, namun demikian ada kekhawatiran bahwa tanpa ada hubungan langsung antara keduanya akan ada bahayanya karena kemungkinan pengeluaran pemerintah semakin berlebihan.

b. Pengelolaan Anggaran

Pendekatan ini lebih banyak disukai daripada pendekatan “pembelanjaan fungsional” karena pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Dalam pendekatan ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidak-stabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Tokoh dalam pendekatan ini adalah Alvin Hansen yang menyarankan bahwa dalam masa depresi di mana ada banyak pengangguran, pengeluaran pemerintah yang meningkat adalah satu-satunya obat.

Dalam perkembangan yang lebih jauh lagi, pendekatan ini selalu berusaha untuk mempertahankan adanya anggaran belanja yang seimbang tanpa defisit anggaran belanja. Sehingga dalam masa depresi, (perekonomian lesu) pengeluaran

pemerintah akan ditingkatkan dan penerimaan dan pajakpun akan ditingkatkan pula tetapi jangan sampai menimbulkan defiasi. Sebaliknya dalam masa inflasi, pajak akan dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mencegah timbulnya akibat inflasi yang tidak diinginkan. Kebaikan dan pendekatan ini ialah bahwa pinjaman negara tidak akan meningkat, tetapi sayangnya sektor swasta menjadi kurang bersemangat karena kurang percaya pada diri sendiri.

c. Stabilisasi anggaran otomatis

Pada akhir tahun 1940-an kepercayaan lebih banyak diberikan pada mekanisme otomatis dan politik fiskal. Penyesuaian secara otomatis dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi sedemikian rupa sehingga membawa perekonomian menjadi stabil tanpa campur tangan pemerintah yang disengaja.

Dengan stabilisasi otomatis pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasar atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macann program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Apabila ada kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran pemerintah dan perpajakan tidak akan diubah, namun penerimaan dan pajak akan menurun, terutama dari pajak pendapatan. Di lain pihak jumlah pengeluaran pemerintah akan meningkat terutama yang dikaitkan dengan gaji, pensiun, bantuan sosial dan sebagainya. Akibatnya defisit dalam anggaran belanja pemerintah muncul dan mendorong perkembangan sektor swasta kembali sampai tercapainya kesempatan kerja penuh. Sebaliknya dalam masa inflasi ada kenaikan dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak pendapatan dan tidak perlu banyak tunjangan pengangguran, sehingga akan ada surplus anggaran belanja.

Peranan “built in flexibility” ini dapat ditingkatkan dengan penambahan pengeluaran pemerintah pada proyek-proyek pekerjaan umum.

d. Anggaran belanja seimbang

Suatu modifikasi dan pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (managed budget) adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan anggaran dalam jangka panjang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dapat pula diikuti pendekatan serupa tetapi tetap mempertahankan keseimbangan anggaran. Dalam masa depresi, pengeluaran perlu ditingkatkan diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan memperbesar utang negara.

2.1.7 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X - M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian (Afiat, 2015:22).

2.1.7.1 Fungsi Pengeluaran Pemerintah

1. Fungsi Pemerintah Menurut Richard A. Musgrave

Menurut teori ekonomi analitis yang ditulis oleh R.A. Musgrave dengan judul *A Theory of Public Finance* bahwa fungsi dan tujuan kebijaksanaan anggaran belanja (pemerintah) dibedakan atas 3 jenis, yakni:

a. *Allocation Branch*

Allocation Branch, dinyatakan sebagai fungsi untuk menyediakan pemenuhan terhadap *public wants* (kebutuhan publik). Dengan latar belakang kebaikan mekanisme pasar pada fungsi alokasi secara optimal, juga dengan kekurangan-kekurangan mekanisme pasar tampillah peranan pemerintah dalam *allocation branch* ini. Jadi, tugas pemerintah adalah mengisi kelemahan atau kekurangan mekanisme pasar dengan menyediakan apa yang dinamakan *public wants*.

b. *Distribution Branch*

Distribution Branch, merupakan fungsi politik anggaran belanja yang termasuk “fungsi klasik” di mana pengeluaran dan penerimaan pemerintah ternyata mempunyai efek sosial-ekonomis. Pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar, macam-macam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas cabang distribusi tersebut.

c. *Stabilization Branch*

Stabilization Branch, bilamana fungsi alokasi dan fungsi distribusi menyangkut hubungan antara swasta atau pribadi dengan pemerintah atau publik, sehingga

cabang stabilisasi ini menyangkut usaha untuk mempertahankan tingkat penggunaan faktor-faktor produksi yang tinggi dengan kestabilan nilai uang.

2. Fungsi Pemerintah Menurut John Stuart Mill

John Stuart Mill (klasik) membagi fungsi pemerintah dalam:

- a. *The Necessary Function of Government*, yaitu fungsi yang tidak terpisahkan dari semua macam pemerintahan. Fungsi ini hampir sama dengan the three duties of attend dari Adam Smith.
- b. *Optional Function of Government*, yaitu merupakan fungsi fakuktatif. Menurut John Stuart Mill sedapat mungkin dibatasi. Contoh: Pemberian pengajaran, pemeliharaan orang-orang sakit jiwa. Pembatasan ini berdasarkan dalil atas pendirian bahwa setiap campur tangan pemerintah akan menghalangi pelaksanaan fungsi jasmani dan rohani perseorangan.

3. Fungsi Pemerintah Menurut Adolf Wagner

Alat-alat pemerintah merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan kolektif. Dengan perkataan lain, pemerintah memproduksi kolektif, seperti memproduksi untuk memenuhi kebutuhan kolektif. Adolf Wagner membagi tujuan negara dalam dua bagian, yaitu:

- a. *Rechts und machtz-weck*, tujuannya untuk mempertahankan hukum dan kekuasaan negara (prinsip keadilan);
- b. *Kultur und wohlfetzweck*, tujuannya untuk memelihara perkembangan kebudayaan dan kemakmuran (misalnya, sekolah dan rumah sakit).

4. Fungsi Pemerintah Menurut UUD 1945

Tugas atau fungsi pemerintah negara/Indonesia terdapat pada alinea keempat yang menyebutkan, antara lain:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

5. Fungsi Pemenintah dalam Sistem Kapitalisme

Adam Smith sebagai salah satu pelopor sistem kapitalisme kenamaan yang dalam kaitannya dengan tugas atau fungsi pemerintah membedakan pengeluaran pemerintah menjadi empat bagian, yaitu:

a. Expense of Defence

Expense of defence, merupakan tugas pemerintah atau negara untuk melindungi masyarakat dari kekejaman/serangan negara/ masyarakat lain. Tugas tersebut pada waktu sekarang lebih dikenal dengan istilah tugas atau fungsi pertahanan yang dalam praktiknya terutama dilakukan oleh angkatan perang atau angkatan bersenjata.

b. Expense of Justice

Expense of justice, dalam kehidupan sehari-hari merupakan tugas melindungi setiap anggota masyarakat terhadap ketidak adilan dan tekanan dari anggota masyarakat lainnya yang dilakukan oleh pamong praja, polisi dan penjaga

masyarakat yang lain, peradilan termasuk hakim dan jaksa serta perlindungan lainnya baik formal maupun informal.

c. Exvense of Supporting the Dignity of the Sovereign

Expense supporting the dignity of the sovereign, adalah tugas untuk membantu meningkatkan martabat negara termasuk pejabat-pejabat negara. Faktor kepribadian dan kebudayaan bangsa merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan pergaulan dunia pada umumnya, karena itu kegiatan ini dibiayai oleh negara (Ujiyanto, dkk, 2017:74-80).

2.1.7.2 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

1. Anggaran Belanja Rutin

- a. Anggaran Belanja Rutin, adalah belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari secara terus-menerus, anggaran rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.
- b. Belanja pegawai adalah untuk pembayaran gaji dan upah pegawai termasuk gaji pokok dengan segala macam tunangan (toeslag) atau tambahan-tambahannya.
- c. Belanja barang adalah untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari seperti untuk pembelian kertas, tinta, pita, karbon, kapur dan alat-alat tulis lain untuk sekolah-sekolah, dan lain-lain.
- d. Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah (barang-barang kapital tetap) seperti gedung,

kendaraan, perabot rumah tangga, dan lain- lain tetap terpelihara secara baik.

- e. Belanja perjalanan adalah biaya perjalanan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan seperti biaya pembelian bensin, karcis kereta api, penginapan, dan sebagainya

2. Anggaran Belanja Pembangunan

Anggaran belanja pembangunan adalah pengeluaran untuk pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, gedung-gedung, pembelian kendaraan, dan lain-lain, maupun pembangunan nonfisik spiritual termasuk penataran-penataran, training, dan lainlain. Anggaran belanja pembangunan ini adalah untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan dalam satu periode tertentu dan bukan secara terus-menerus.

2.1.7.3 Prinsip-prinsip Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah dalam melaksanakan tugas atau fungsinya yang menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki dan atau dikuasai, oleh karena secara langsung maupun tidak langsung menggunakan uang dan sumber daya ekonomi masyarakat hendaknya menggunakan atau berpedoman pada prinsip-prinsip pokok tertentu. Menurut Adam Smith (dikutip dari Ujianto, dkk, 2017:100) Prinsip-prinsip pokok pengeluaran ini dapat dibedakan:

- a. Asas moralita**, Dasar moral merupakan fondasi dari perbuatan-perbuatan yang akan menentukan perkembangan atau kemerosotan suatu bangsa. Oleh karena asas moralita merupakan kedudukan yang fundamental, maka dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dengan

pengeluaran-pengeluarannya faktor moralita hendaknya merupakan dasar pemikiran yang strategik. Pelanggaran-pelanggaran nilai moral akan menyebabkan pelaksanaan fungsi pemerintah mejadi kurang efektif dan atau menimbulkan pemborosan-pemborosan

b. Asas nasionalita, asas nasionalita atau asas kebangsaan adalah suatu asas yang menjadi dasar tugas dan pelaksanaan tugas pemerintah serta merupakan identita yang harus dilayani. Bahwa bangsa sebagai keseluruhan atau identitas yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan tersendiri yang terlepas dengan kepentingan dan kebutuhan tiap-tiap warga negara merupakan pendapat yang telah lama dikemukakan oleh para ahli falsafah.

c. Asas kerakyatan (demokrasi).

d. Asas rasionalita, Asas ini mengharuskan bahwa segala tindakan pemerintah yang kongkretnya berupa tindakan pejabat-pejabat pemerintah hendaknya didasarkan pada penggunaan akal yang jernih. Ketajaman akal merupakan pelita dalam segala tindakan. Tindakan rasional mengharuskan orang untuk selalu memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dalam arti untuk mencapai tujuan atau maksud yang telah ditetapkan hendaknya digunakan sumber daya ekonomi yang minimum. Efektivitas dalam arti dengan sumber daya ekonomi yang ada atau dimiliki hendaknya digunakan sebaik-baiknya.

e. Asas fungsionalita atau teleologis, Suatu lembaga kenegaraan ataupun seorang pejabat dalam melaksanakan tugas termasuk perencanaan dengan segala aspeknya dan pengawasan juga dengan segala seginya hendaknya

berdasarkan pada fungsi atau kedudukannya. Unsur-unsur pembagian kekuasaan dan pembagian tugas, deskripsi tugas hendaknya selalu dijadikan landasan tempat berpijak. Prinsip-prinsip manajemen termasuk manajemen kantor hendaknya selalu diperhatikan. Sebagai seorang fungsionaris dan sebagai suatu lembaga kenegaraan dalam segala kegiatannya hendaknya selalu memperhatikan landasan hukum, tujuan yang telah ditetapkan serta wewenang yang telah diperhatikan.

2.1.8 Penerimaan Pajak

2.1.8.1 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah (Ujiyanto, dkk, 2017:60):

- a. Menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran public

- b. Menurut Leroy Beaulieu, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
- c. Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan (undang-undang) umum, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan

Dari definisi di atas, disimpulkan bahwa pajak merupakan retribusi (iuran) masyarakat yang sifatnya dapat memaksa, yang bertujuan agar pemerintahan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya serta mengisi kas negara untuk kesejahteraan masyarakat (Ujiyanto, dkk, 2017:60).

Pada era sekarang ini, dalam menyusun anggaran pendapatan belanja negara (APBN), pemerintah memberikan beban yang berat terhadap sektor pajak dalam upaya memberikan kontribusi pada pembangunan. Sadar akan fungsinya sebagai tulang punggung dalam membiaya pembangunan, penerimaan pajak dari waktu ke waktu terus ditingkatkan yang dapat dilihat dari tax ratio sebagai indikatornya. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Dengan demikian, pada hakikatnya rasio pajak bisa dipergunakan untuk melihat indikasi

besarnya beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung masyarakat (Ikhsan & Amir, 2016:196).

2.1.8.2 Fungsi Penerimaan Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu (Rahayu, 2014:42):

- a. Fungsi Budgetair, digunakan sebagai untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- b. Fungsi regulerend, digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. fungsi regulerend disebut juga sebagai fungsi tambahan, karena fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair.

2.1.9 Hubungan Antar Variabel

2.1.9.1 Hubungan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank Sentral, akan direspon oleh para pelaku pasar dan para penanam modal untuk meningkatkan produksi dan menanamkan investasinya. Seiring dengan itu, akan berdampak juga pada jumlah produksi yang bertambah dan tenaga kerja yang juga akan semakin bertambah. Akibatnya ekspor bertambah dan jumlah pengangguran menurun, sehingga devisa yang masuk ke negara tersebut semakin menguatkan dollar terhadap mata uang lain, dan pada akhirnya seluruh komponen tersebut akan berdampak terhadap perekonomian suatu negara (Nurlina & Zurjani, (dikutip dari Nanga, 2007:84)).

Pada teori Asnawi & Fitria (2018:27) bahwa Pada saat level tingkat suku bunga meningkat maka suku bunga kredit dan deposito juga akan cenderung meningkat. Ketika suku bunga deposito meningkat maka masyarakat memilih menyimpan uang pada bank-bank dan uang beredar di masyarakat akan berkurang. Pada saat

suku bunga kredit, kenaikan suku bunga akan memicu pelaku usaha untuk mengurangi investasi dikarenakan biaya modal yang tinggi.

Hasil ini sesuai teori dimana teori menyatakan apabila suku bunga tinggi, maka jumlah investasi akan berkurang yang artinya pertumbuhan ekonomi akan turun, sebaliknya apabila suku bunga rendah maka akan mendorong banyak investasi yang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Asnawi & Fitria (dikutip pada Sukirno: 2015)).

2.1.9.2 Hubungan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

kelompok Keynesian (dikutip di Warjiyo & Solikin, 2003:27) berpendapat bahwa uang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi riil di samping pengaruhnya terhadap inflasi. Implikasinya adalah bahwa kebijakan moneter dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk secara aktif mempengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi riil. Dengan kata lain, bank sentral mempunyai discretion untuk mempergunakan kebijakan moneter secara aktif membantu upaya-upaya untuk mempengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi riil.

Apabila kegiatan ekonomi riil dirasakan terlalu lesu, kebijakan moneter dapat dilonggarkan sehingga jumlah uang beredar dalam perekonomian bertambah dan dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, apabila kegiatan ekonomi riil dinilai terlalu cepat dan cenderung memanas, kebijakan moneter perlu diketatkan sehingga terjadi penurunan kegiatan ekonomi riil dan tingkat inflasi dapat terkendali.

Asnawi & Fitria (2018;30) berpendapat bahwa semakin meningkat jumlah uang beredar maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini terkait karena dengan peningkatan jumlah uang beredar, maka masyarakat akan menempatkan sebagian dananya untuk konsumsi sehingga membuat produsen memproduksi barang lebih banyak kemudian permintaan akan faktor produksi meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada pendapatan perkapita kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.9.3 Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekonomian disuatu negara. Tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak. Tarif pajak yang relatif kecil akan berdampak sebaliknya, investasi melaju, pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara membesar. Jadi, jelas setiap kebijakan perpajakan memiliki dampak ekonomi makro dan aspek sosial lainnya (Nurlina & Zurjani, (dikutip dari Ibrahim, 2013))

2.1.9.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah pada dasarnya dapat dilihat sebagai kebijakan fiskal karena meningkatkan permintaan agregat Peningkatan pendapatan masyarakat yang dalam hal ini diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai akibat peningkatan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan melalui adanya multiplier efek dari pengeluaran pemerintah (government expenditure). Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser titik keseimbangan

pendapatan nasional pada tingkatan yang lebih tinggi. Sehingga semakin besar pengeluaran pemerintah, diharapkan pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat (Lianti, Hamzah, & Nasir, 2013:37)

2.2 Penelitian Terdahulu

Sigit Hartoko (2019) menulis penelitian tentang Kajian Kritis Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2014-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan evaluative. Hasil penelitian evaluatif ini memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang, dimana kebijakan fiskal dan moneter haruslah lebih menekankan peningkatan daya beli masyarakat agar berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi., dengan diiringi kebijakan moneter yaitu tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah. Peningkatan konsumsi berdampak terhadap peningkatan investasi, perolehan pajak yang lebih besar sehingga meningkatkan kemampuan belanja pemerintah.

Ridho Windi Atmojo (2018) menulis penelitian tentang Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Penelitian ini memakai model IS-LM dengan menggunakan metode Two-Stage Least Square (TSLS) untuk mengestimasi variabel yang ada dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai PDB Indonesia dengan menggunakan IS-LM sebesar 2034769.68 miliar dan tingkat bunga berada di - 8.78 persen. multiplier kebijakan fiskal sebesar 0.63 dan nilai multiplier moneter sebesar 1.72.

Angandrowa Gulo (2008) menulis penelitian tentang Analisis Pengaruh Aspek Moneter dan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Metode analisis menggunakan estimasi dengan model *Ordinary Least Square* (OLS). Berdasarkan hasil model estimasi diketahui bahwa kondisi perekonomian setelah krisis ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin buruk pasca krisis ekonomi tahun 1997.

Yuniarti, Wiwin Wianti, dan Nandang Estri Nurgaheni (2020) menulis penelitian tentang Analisis factor-faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Analisis yang digunakan yaitu statistik regresi berganda atau *multiple linear regression model of ordinary leastsquare (OLS)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya tingkat partisipasi angkatan dan tingkat pengangguran yang terbukti secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan tidak signifikan secara statistik.

Wiwiet Aji Priharin, Arintoko, dan Suharno (2019) menulis penelitian tentang Analisis Pengaruh Variabel-variabel Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan teknik estimasi *Ordinary Least Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable suku bunga SBI dan jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel kurs dan inflasi

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Periode 2010-2017.

Rinaldi Syahputra (2017) menulis penelitian tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier Berganda. Hasil dari analisis koefisien determinasi diketahui bahwa bahwa ekspor, penerimaan pajak, dan nilai tukar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 50,10%, sedangkan sisanya 49,90% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Adrian Sutawijaya dan Etty Puji Lestari (2013) menulis penelitian tentang Penerapan Metode Vector Auto Regression Dalam Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah *vector autoregresi (var)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal merupakan guncangan negatif terhadap inflasi dan direspon dengan kebijakan moneter ketat, sedangkan guncangan kebijakan moneter akan mengurangi pendapatan nasional. Penerapan kebijakan moneter dan fiskal akan menaikkan pertumbuhan ekonomi secara efektif.

Asnawi dan Fitria (2018) menulis tentang Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan merupakan Regresi linear berganda. Hasil analisis sebagian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan suku bunga tidak berpengaruh pertumbuhan ekonomi di

Indonesia. Secara bersamaan jumlah uang beredar, bunga suku bunga dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Nurlina dan Zurjani (2018) Menulis tentang Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam perekonomian Indonesia. Data dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil analisis Secara parsial dan simultan penerimaan pajak dan tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

M. Natsir (2006), menulis tentang Analisis Empiris Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia Melalui Jalur Ekspektasi Inflasi Periode 1990-2007. Metode analisis menggunakan model regresi Vector Auto (VAR). Hasil dari penelitian ini Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui Jalur Ekspektasi Inflasi efektif mewujudkan sasaran akhir kebijakan moneter di Indonesia. Tapi, time lag atau waktu tunda yang dibutuhkan sekitar 12 triwulan. Artinya, untuk dapat mewujudkan sasaran akhir kebijakan moneter di Indonesia dibutuhkan waktu sekitar 12 triwulan yang dihitung sejak dari shock instrumen kebijakan moneter hingga terwujudnya sasaran akhir kebijakan moneter (inflasi).

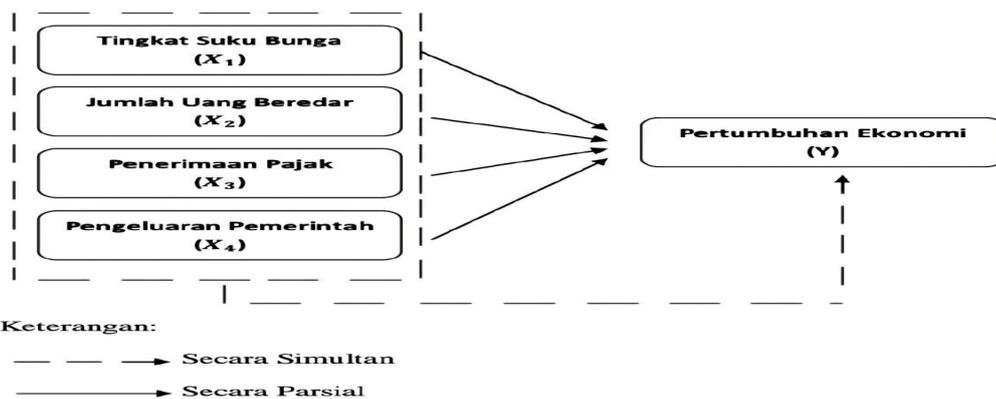
2.3 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mempengaruhi peningkatan percepatan pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut, yang pada akhirnya berindikasi dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan kenaikan Produk

Domestik Bruto (PDB) dari waktu ke waktu. Laju pertumbuhan PDB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah memiliki dua kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yakni kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dimana Kebijakan tersebut berhubungan dengan pajak, pengeluaran pemerintah, dan tingkat suku bunga serta jumlah uang beredar

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat diambil kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 4 Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan Pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini yaitu diduga tingkat suku bunga (x_1), jumlah uang beredar (x_2), pajak (x_3), dan pengeluaran pemerintah (x_4) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2007-2021 baik secara Simultan dan parsial.

